

CONTRIBUTION OF FINANCIAL INCLUSION ON HUMAN CAPITAL ESTABLISHMENT IN REAL SECTOR BUSINESS

Abdus Salam Dz

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jalan Perjuangan, Sunyaragi, Kesambi, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
abdussalamdz@gmail.com



ABSTRACT

In an effort to promote equitable and sustainable economic growth, the government through Bank Indonesia, including sharia banking has launched a financial inclusion policy, particularly for small and medium enterprises in the real sector. There are two strategic sectors that contribute positively to the acceleration of Indonesia's economic growth, namely the agricultural sector and Small and Medium Enterprises (UKM). However, these two business sectors are still weak in the productivity of human resources, capital, and competitiveness. This study aims to examine the relationship and financial inclusion contribution to the human capital formation in the real sector. The research method used a survey to 200 respondents in five districts/cities in Cirebon region, and analyzed using statistics. The results concluded: (1) There is a relationship between financial inclusion with human capital formation; (2) Financial inclusion contributes positively to the human capital formation of UKM in the real sector. The implication is that financial inclusion policies can support national economic growth through increasing human capital productivity and helping to expand the activities of small and medium enterprises in the real sector as well as employment in Indonesia.

Keywords: *Financial inclusion, human capital, real sector.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis riil di Indonesia sangat strategis, karena memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian, perikanan/kelautan dan energi yang luas, sumber daya ekonomi perdagangan dan industri cukup tinggi serta sumber daya manusia dengan jumlah penduduk yang besar. Untuk mendorong pengembangan usaha ini, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Inpres ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Usaha kecil dan menengah (UKM) telah berperan besar dalam menghasilkan lapangan kerja dan memajukan pembangunan ekonomi secara global. UKM adalah bagian mendasar dari struktur ekonomi di negara-negara berkembang, dan mereka memainkan peran penting dalam memajukan pertumbuhan, inovasi dan kemakmuran. Jenis usaha ini secara historis menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi domestik, terutama sebagai penyedia lapangan kerja, dan karenanya generator sumber pendapatan primer atau sekunder bagi banyak rumah tangga (Palmarudi dan Agussalim, 2013). Lebih lanjut Ojokuku dan Sajuyigbe (2014) menegaskan bahwa UKM telah diakui secara global sebagai mesin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Usaha kecil dan menengah merupakan solusi untuk mengatasi lambannya perkembangan ekonomi di antara negara-negara berkembang.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, perkembangan jumlah unit usaha di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 59,3 juta, dimana 99,9 persen diantaranya adalah UKM. Namun masalah klasik pun tetap menjadi kendala. Hambatan utama adalah modal, baik modal

manusia maupun modal keuangan. Terkait modal manusia, umumnya sumberdaya manusia UKM masih rendah. Sedangkan permodalan fisik, sekitar 60-70% UKM belum mendapat akses permodalan atau pembiayaan perbankan akibat persyaratan perbankan dan ketidaktahuan alternatif pendanaan selain perbankan.

Proses pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dipengaruhi oleh faktor modal, baik modal fisik keuangan maupun modal manusia. Untuk membangun dan mempertahankan usaha, pengusaha perlu memiliki akses sumber daya yaitu modal manusia, modal fisik dan modal finansial, masing-masing menuntut peran berbeda, namun saling ketergantungan bagi kelangsungan hidup perusahaan, terutama bagi siklus hidup usaha baru.

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Modal manusia muncul dari aktivitas apa pun yang mampu meningkatkan produktivitas pekerja secara individu. Bahkan di bidang ekonomi, kritik teori modal manusia (*human capital*) menunjukkan sulitnya mengukur konsep utama, termasuk pendapatan masa depan dan gagasan utama modal manusia itu sendiri. Tidak semua investasi di bidang pendidikan menjamin kemajuan dalam produktivitas sebagaimana dinilai oleh pengusaha atau pasar.

Bukti empiris tentang pentingnya modal manusia dan keuangan tersebut banyak ditemukan para peneliti UKM, diantaranya Acs (2001) mengungkapkan bahwa kesulitan yang dihadapi pengusaha terutama berasal dari kurangnya pengetahuan atau keterampilan modal manusia dan terbatasnya keuangan. Padahal untuk keberhasilan atau kegagalan UKM sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan kemampuan pemilikinya (Ahmad et al. 2010). Marshall dan Oliver (2005) mengamati bahwa kesulitan ditemui pengusaha sering menjadi hambatan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, keuangan, sampai jejaring sosial yang mendukung. Dalam proses wirausaha ada tiga kategori modal dasar yang berkontribusi untuk usaha yang sukses; manusia, keuangan, dan sosial.

Banyak daerah pedesaan menghadapi kendala dalam masalah pendanaan; arus transaksi terbatas, biaya per investasi yang lebih tinggi, peluang terbatas untuk keluar dari kesepakatan, dan lingkungan bisnis lokal yang menantang (Drabenstott dan Sheaff 2001). Mengakses usaha atau modal ekuitas mungkin merupakan rintangan terpenting yang menghambat kewiraswastaan. Di banyak tempat pedesaan, pasar ekuitas tidak ada atau tidak terorganisir secara maksimal (Markley, 2001; Barkley, 2003).

Modal keuangan dan modal manusia merupakan kemampuan dan keterampilan pekerja yang mempengaruhi keseluruhan produktivitas usaha. Pendidikan formal merupakan salah satu komponen penting dari modal manusia yang dapat membantu dalam akumulasi pengetahuan eksplisit dan keterampilan yang berguna bagi pengusaha (Gimeno et al 1997; Reynolds et al., 2002; Montgomery, Johnson, dan Faisal 2005).

Modal manusia adalah sesuatu yang melekat dalam diri individu, merupakan kemampuan dan potensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Modal manusia meliputi kemampuan individu, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baik di kalangan karyawan maupun manajer perusahaan (Edwinson & Malone, 1997), modal manusia adalah nilai kolektif dari pengetahuan organisasi (Bohlander, Snell & Sherman, 2001). Human capital merupakan investasi jangka panjang sebagai basis penggerak untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan konsep Matsushita *Electric* yang menyatakan bahwa membuat orang dulu, baru membuat barang. (Harmein Nasution, 2008).

Modal manusia sebagai bekal kompetensi, pengetahuan dan atribut kepribadian yang terkandung dalam kemampuan untuk melakukan perburuhan sehingga menghasilkan nilai ekonomi (Sullivan dan Sheffrin, 2003), merupakan investasi orang, membuat diri sendiri atau organisasi yang meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Berdasarkan teori dan modelnya, modal manusia memiliki peran penting dalam penciptaan nilai ekonomi dan bisnis (McGregor dkk. 2004; Karami dkk. 2006). Faktor kemampuan dan keterampilan modal manusia berkualitas diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam industri kecil dan menengah (Skuras 2005).

Modal manusia meliputi keterampilan dan kemampuan individu dalam berorganisasi, serta mencerminkan kompetensi yang dibawa kepada pekerjaannya (Lengnick Hall dan Cynthia A. Lengnick Hall, 2003), merupakan aset penting dan esensial yang memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan pertumbuhan sebagaimana halnya aset fisik seperti mesin dan modal kerja. Sikap, skill dan kemampuan manusia berkontribusi terhadap produktivitas organisasi (Stockey 2003).

Modal manusia adalah kompetensi dan atribut yang terkandung dalam individu yang memfasilitasi terciptanya pribadi, sosial dan kesejahteraan ekonomi. Aspek-aspek yang paling relevan dengan angkatan kerja organisasi dan produktivitas adalah: pembelajaran formal (belajar mengarah ke kualifikasi); pembelajaran non-bersertifikat (on-the-job training, pengalaman kerja, atau pembelajaran lainnya yang tidak mengarah ke kualifikasi formal); keterampilan dasar; manajemen dan kepemimpinan.

Bruderl dkk. (1992) adalah peneliti pertama agar sesuai dengan teori human capital dalam konteks wirausaha, dengan alasan bahwa meskipun secara umum penerapan human capital adalah pada karyawan, tidak ada alasan mengapa hal itu tidak berlaku bagi pengusaha juga. Dengan demikian, pengusaha dengan modal manusia umum dan spesifik yang lebih tinggi dapat diharapkan untuk menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Ini disebut sebagai modal manusia wirausaha.

Dalam konteks usaha sektor riil, pada tahun 2010 *World Bank* dan *International Finance Corporation* merilis data *Micro Small Medium Enterprise* yang memaparkan data indikator UKM di 132 negara. Umumnya, hambatan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan UKM adalah keterbatasan akses keuangan. Dari banyak penelitian sebelumnya terungkap bahwa kesulitan yang dihadapi pengusaha terutama berasal dari kurangnya pengetahuan atau keterampilan dan kurangnya keuangan.

Pentingnya modal finansial bagi kinerja UKM ini, Elsenhardt dan Martin (2000) dengan menggunakan *Resource Based theory* menunjukkan bahwa akses ke modal finansial untuk membeli aset tetap dan lancar guna mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Studi empiris Wiklund dan Shepherd (2004), Zhou dan Chen (2008) mengidentifikasi bahwa UKM butuh modal finansial untuk mendapatkan sumber daya fisik guna memanfaatkan peluang bisnis. Kurangnya sumber daya fisik sangat berpotensi dan menjadi faktor penentu kegagalan UKM.

Harding (2002) mengemukakan bahwa human capital memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pengusaha untuk mendapatkan modal finansial bagi usaha. Modal finansial untuk perusahaan start up paling sering berasal dari modal hutang, dari pengusaha sendiri, pelaku bisnis, atau pemodal ventura. Pengusaha kecil memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan dari pemodal ventura. Karena pendanaan modal ventura sebagian besar tidak tersedia untuk usaha kecil.

Tidak tersedianya modal kerja merupakan kendala utama bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan UKM baru (Garcial-Teruel dan Martinez-Solano, 2007). Modal keuangan bisa berasal dari internal atau eksternal (Pretorius dan Shaw, 2004). Sebagian besar UKM bergantung pada keuangan internal. Keuangan internal seringkali tidak memadai bagi UKM untuk bertahan dan tumbuh.

Hasil penelitian Carpenter dan Petersen (2002) menemukan bahwa pertumbuhan UKM umumnya ketergantungan pada keuangan internal. Persaingan sengit dalam trend globalisasi, pengembangan teknologi yang cepat, siklus produk yang lebih pendek, dan persyaratan inovasi menuntut pelaku UKM untuk meningkatkan dan mempercepat perkembangan investasinya. Namun, hal itu semakin sulit meningkat untuk menjaga biaya dalam batasan dari pembiayaan sendiri. Karena itu, UKM butuh modal dari sumber eksternal.

Inklusi keuangan atau sistem keuangan inklusif telah menjadi salah satu agenda global yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan merupakan salah satu topik bahasan utama di berbagai pertemuan tingkat tinggi sektor keuangan baik level internasional, regional Asia, maupun level nasional. Keuangan inklusif juga telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah Indonesia.

Saat ini inklusi keuangan menjadi topik hangat di bidang kebijakan karena potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, ada hubungan yang kuat namun terbalik antara tingkat inflasi dan ukuran pinjaman bank umum dan uang muka sebagai rasio PDB. (Mbutor O. Mbutor and Ibrahim A. Uba, 2013). Ada cukup bukti untuk menjelaskan dan membenarkan bahwa sistem keuangan yang sehat dan mapan dapat bertindak sebagai alat pengentasan kemiskinan utama. Sistem keuangan yang kurang berkembang berarti biaya besar, ekonomi lebih rendah bagi orang biasa, investor dan pengusaha pemula. Beck dan de la Torre (2006) menunjukkan bahwa sistem keuangan yang matang mampu mengalokasikan sumber daya kepada pendatang baru.

World Bank (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Beberapa studi sebelumnya (Wignaraja, 2012; Presisi, 2014) menunjukkan bahwa secara umum partisipasi UKM dalam Global Value Chain (GVC) masih rendah. Partisipasi yang rendah ini diakibatkan oleh karena keterbatasan sumber daya seperti keuangan, informasi, kapasitas manajemen dan teknologi serta akses terhadap informasi pasar. Studi lain (Harvie, Nardjoko & Oum, 2010) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat meningkatkan partisipasi dalam GVC antara lain skala usaha, kematangan usaha, foreign linkage, produktivitas, inovasi dan akses pembiayaan.

Inklusi keuangan sebenarnya dapat membantu mereka dalam pengelolaan usaha yang lebih baik. Inklusi keuangan memiliki hasil yang dapat diukur yang pasti dapat membimbing orang untuk mendapatkan akses ke sistem keuangan formal yang akan membantu mereka keluar dari jebakan kemiskinan. Titik fokus akan selalu berputar di sekitar masyarakat umum karena mereka merupakan media yang paling penting untuk transfer surplus ekonomi (Mohit Kumar & Kushendra Mishra, 2016).

Banyak penelitian menunjukkan berbagai temuan empiris, bahwa inklusi keuangan mengarah pada akses masyarakat ke sistem perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah bagi usaha sektor riil. Ayyagari M, dkk (2013) bahwa pendalaman keuangan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan dengan memacu kewiraswastaan dan mendorong migrasi sektor geografis (Clarke, G, LC Xu dan Zhou H. (2006); Beck, T, R. Levine dan A. Levkov (2010).

Penelitian terakhir difokuskan pada pentingnya kendala likuiditas dan akumulasi human capital dalam penentuan wirausaha (Thomas Dunn & Douglas Holtz-Eakin, 2000). Penyertaan keuangan yaitu akses ke layanan keuangan untuk perusahaan kecil dan menengah merupakan bagian yang meningkat dari agenda pembangunan pembuat kebijakan (Ardic et al., 2011; Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2013; Allen et al., 2016).

Kelompok Bank Dunia telah berkomitmen untuk mencapai akses keuangan universal pada tahun 2020, bahwa setiap orang harus bisa menggunakan jasa keuangan dasar untuk mengumpulkan kekayaan, mencari dana untuk investasi, dan mengatasi risiko (Bank Dunia, 2013). Pembuat kebijakan menekankan pentingnya membangun sistem keuangan inklusif karena mereka percaya bahwa penyertaan keuangan berkontribusi untuk kesejahteraan individu, insentif penting bagi gagasan dan teknologi baru (King dan Levine, 2003); (Pratisha Padmasri Deka, 2015).

Temuan penelitian China dan Chinn (2001) mengemukakan bahwa modal manusia merupakan faktor kunci bagi perkembangan keuangan yang pada gilirannya mengarah pada penciptaan modal manusia lebih jauh. Atieno (2009) mengamati bahwa UKM membutuhkan eksternal keuangan untuk mengurangi dampak masalah arus kas. Pembiayaan eksternal dibutuhkan untuk UKM guna memulai dan memperluas operasi, mengembangkan produk baru, berinvestasi di staf baru atau fasilitas produksi. Tersedianya dana investasi yang positif nilai bersih proyek sangat penting bagi keberlanjutan dan kelangsungan hidup UKM.

Tuntutan akan tingkat produktivitas, keterampilan, kompetensi dan nilai tambah tinggi sebagai modal manusia sangat penting untuk keberhasilan dan kelangsungan suatu perusahaan di masa depan. Karena modal manusia mendorong produksi barang dan jasa serta inovasi baru, utamanya pada usaha sektor riil. Para ekonom berpandangan bahwa modal manusia organisasi atau perusahaan hanya bisa terbentuk melalui pendidikan dan pelatihan baik sebelum maupun sesudah memasuki dunia kerja, dan pemahaman modal manusia ini berorientasi pada tenaga kerja. Karena itu, akan timbul masalah jika pada dewasa ini terjadi pergeseran bahwa pentingnya modal manusia bukan ditujukan kepada individu tenaga kerja semata, melainkan kepada pelaku usaha yang dapat terbentuk melalui keterbukaan akses permodalan lembaga keuangan (inklusi keuangan), karena di dalamnya ada aspek edukasi dan informasi (*transfer of knowledge, information, skill, creativity, and value added*) untuk meningkatkan produktivitas modal manusia. Atas dasar persoalan inilah diajukan hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara inklusi keuangan perbankan syariah dengan pembentukan modal manusia, dan inklusi keuangan memberi kontribusi positif dan signifikan terhadap pembentukan modal manusia sektor riil UKM.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey; *descriptive survey* maupun *explanatory survey*. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan korelasional antara satu variabel dengan variabel lain, serta pengaruhnya terhadap variabel lain, disamping untuk menguji hipotesis dan signifikansinya. Oleh karena itu lebih tepat tipe penelitian yang digunakan adalah *causal relationship* (Cooper & Schindler, 2001: 151). Metode penelitian survey menitik beratkan pada penelitian rasional, yaitu mempelajari pengaruh dan hubungan variabel *independent* terhadap variabel *dependent* (Emory, 1996: 287).

Populasi adalah seluruh pelaku usaha sektor riil yang ada di wilayah Cirebon yang menerima, mengakses dan memanfaatkan inklusi keuangan layanan perbankan syariah dari berbagai jenis usaha sektor riil. Oleh karena mengalami kesulitan memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian ini, maka untuk memudahkan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari dan menemui para responden di kantor-kantor bank syariah yang ada wilayah Cirebon (Kota dan kab. Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu), dengan asumsi bahwa mereka yang datang ke kantor bank syariah tersebut dipastikan telah mengakses dan menggunakan jasa bank syariah di seluruh kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan outlet-outlet pembayaran yang ada di lima daerah tersebut. Kantor-kantor bank yang dikunjungi adalah bank syariah mandiri (BSM), bank Muamalat, BRI Syariah, BNI syariah, BTPN Syariah, BTN syariah, BJB syariah, BCA syariah dan Bank Mega syariah.

Kesulitan kedua adalah untuk menentukan populasi dan sampel yang dijadikan sasaran penelitian. Karena semua perbankan terikat oleh prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian, maka pihak perbankan tidak bisa memberikan data nasabahnya. Dengan demikian jumlah populasi seutuhnya tidak dapat diketahui (*infinite*), karena itu penentuan sampel secara Sengaja (*Purposive Sampling*) dan *accidental sampling* (Sekaran, 2000: 277), dengan teknik *simple random sampling* pada setiap kelompok jenis usaha sesuai karakteristik yang telah ditentukan, agar memperoleh data yang diperlukan secara valid.

Untuk survei yang valid dalam statistik, sampel dipilih secara obyektif sehingga masing-masing anggota populasi memiliki kesempatan seleksi non-nol yang diketahui (Jackson, SL, 2011; Roscoe, J.T, 1975; Sekaran, 1992) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel bahwa sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen. Lebih lanjut Gay dan Diehl (1992) menentukan, untuk penelitian korelasional paling sedikit 30 elemen populasi.

Untuk keabsahan data dalam penelitian dilakukan uji validitas dan realibilitas menggunakan analisis korelasi Pearson dengan kriteria menggunakan r tabel. Sedangkan uji realibilitas menggunakan nilai *cronbach's alpha* > 0,60. dengan bantuan software SPSS.16. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan kontribusi inklusi keuangan bank syariah terhadap pembentukan modal manusia pelaku UKM, dengan bantuan software Lisrel 8.80.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, dalam analisis data dilakukan langkah-langkah statistik sesuai dengan kaidah-kaidah metode survey, yaitu: Uji validitas dan realibilitas, analisis korelasi dan regresi serta uji asumsi klasik yang terdiri uji normalitas, uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji validitas menggunakan analisis korelasi pearson, dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel. dengan taraf kepercayaan 5% dimana $N=200-2=198$ didapatkan nilai r-tabel sebesar 0,138, yang berarti Valid. Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai *cronbach's alpha* > 0,60. dengan bantuan software SPSS.16. Hasilnya variabel Inklusi Keuangan 0,872 dan Human Capital 0,895 yang menunjukkan semua data reliabel.

Hasil analisis hubungan inklusi keuangan Bank Syariah dengan pembentukan human capital pelaku UKM sektor riil, dengan menggunakan hasil uji data tersebut dapat menjawab hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat inklusi keuangan dengan pembentukan modal manusia UKM sektor riil diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Correlation Matrix = 0.672 yang menunjukkan hubungan yang signifikan.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah memberikan kontribusi terhadap pembentukan human capital pelaku UKM juga diterima. Hal itu ditunjukkan dengan Nilai R^2 sebesar 0,45 yang berarti bahwa besarnya kontribusi inklusi keuangan Bank Syariah terhadap pembentukan human capital UKM sektor riil sebesar 45%. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai Error variance 20,82 yang lebih kecil dibandingkan dengan total varians human capital sebesar 37,94. Sehingga inklusi keuangan Bank Syariah dapat menjelaskan variasi pembentukan human capital usaha sektor riil cukup tinggi. Nilai t-hitung variabel inklusi keuangan Bank Syariah sebesar 12,76 lebih besar dari nilai absolut 1,95, maka dapat dijelaskan bahwa inklusi keuangan bank syariah berkontribusi signifikan terhadap pembentukan human capital usaha sektor riil dengan taraf signifikansi 5%.

Signifikansi kontribusi inklusi keuangan terhadap pembentukan human capital juga didukung oleh nilai konstanta sebesar 16,17; artinya jika kontribusi inklusi keuangan Bank Syariah nilainya adalah 0, maka pembentukan human capital usaha sektor riil adalah sebesar 16,17 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Sedangkan koefisien regresi variabel inklusi keuangan Bank Syariah sebesar 0,55; artinya setiap kontribusi inklusi keuangan Bank Syariah mengalami peningkatan sebesar 1%, maka pembentukan human capital usaha sektor riil diprediksi meningkat sebesar 55%. Koefisien bernilai positif, yang menggambarkan terjadi hubungan searah antara inklusi keuangan Bank Syariah dengan pembentukan human capital usaha sektor riil. Semakin tinggi kontribusi inklusi keuangan Bank Syariah maka pembentukan human capital usaha sektor riil akan mengalami peningkatan yang lebih baik.

Pada penelitian ini, telah ditemukan bukti bahwa inklusi atau keterbukaan keuangan khususnya perbankan syariah berkontribusi terhadap pembentukan human capital UKM sektor riil, sekaligus memberikan wawasan tambahan dalam menjelaskan dampak dari pembiayaan bank pada perusahaan. Sejalan dengan literatur sebelumnya, telah ditemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara perkembangan keuangan dan human capital telah ditunjukkan dalam hasil penelitian Ayushi Raichoudhury (2016) bahwa keterbukaan lembaga finansial tidak mempengaruhi pertumbuhan rata-rata perusahaan, namun berdampak negatif terhadap pertumbuhan perusahaan pada tingkat inklusi finansial yang rendah. Clarke et al. (2010) juga memberikan bukti empiris bahwa akses Untuk modal finansial berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Adanya hubungan antara Inklusi keuangan dengan pembentukan modal manusia UKM sektor riil ini bahwa inklusi keuangan merupakan penyertaan untuk akses terhadap layanan keuangan dasar kepada semua kelompok masyarakat. Inklusi keuangan memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, dapat memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien. *Kedua*, mengurangi biaya modal dan memperbaiki pengelolaan keuangan sehari-hari. *Ketiga*, mengurangi

pertumbuhan sumber kredit informal (seperti pemberi pinjaman uang). Akhirnya, ia memfasilitasi berbagai macam layanan keuangan yang efisien (Ayushi Raichoudhury, 2016).

Penyertaan keuangan menguntungkan semua perusahaan dalam proporsi yang sama sehingga memiliki dampak luas dan positif serta meluas terhadap kinerja perusahaan (Chauvet, L-Luc Jacolin, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pengembangan keuangan harus meliputi rencana khusus untuk meningkatkan inklusi keuangan, pengembangan pasar keuangan bersama dan pertumbuhan pembiayaan usaha. Rencana strategis tersebut melibatkan pengurangan asimetri informasi yang dapat menyebabkan penjatahan pembiayaan dari lembaga perbankan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memperbaiki iklim usaha sektor perbankan itu sendiri.

Program inklusi keuangan perbankan syariah juga berdampak positif terhadap pembentukan modal manusia yang produktif, kreatif, memiliki keterampilan, kompetensi dan nilai tambah pelaku UKM sektor riil. Hal itu ditandai dengan besarnya angka validitas dan reliabilitas hasil pengujian data empirik para pelaku usaha sektor riil yang dijelaskan oleh nilai-nilai hasil pengujian data empirik.

Interaksi positif antara inklusi keuangan dan modal manusia juga menunjukkan bahwa keuntungan finansial yang diharapkan dari segi kinerja perusahaan hanya dapat dirasakan ketika portofolio nasabah dan portofolio pembiayaan bank menjadi lebih inklusif. Dampak inklusi keuangan terhadap modal manusia perusahaan berdampak umpan balik positif dari inklusi keuangan, yang memberi insentif kuat bagi perusahaan untuk bergabung dengan sektor formal, dan seiring waktu memberikan kontribusi terhadap penurunan pembiayaan usaha dan diversifikasi portofolio bank, sehingga memperkuat sektor perbankan.

Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan Solow yang menyatakan bahwa Fungsi produksi bersifat *constant returns to scale* sehingga output akan meningkat dengan proporsi yang sama apabila kapital dan tenaga kerja digandakan dan input-output yang baru digunakan sependung input yang telah ada. Input selain kapital, tenaga kerja dan pengetahuan diasumsikan tidak penting. Berdasarkan anggapan tersebut model Solow diformulasikan sebagai suatu hubungan fungsional dimana output per tenaga kerja efektif sebagai fungsi dari kapital per tenaga kerja efektif. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, setiap terjadi pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Relasi hubungan antara inklusi keuangan dengan pembentukan modal manusia ditunjukkan dari adanya persamaan kepentingan dalam mendukung kemampuan sumberdaya manusia sebagai faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa, dimana kedua faktor tersebut saling interdependensi. Secara teoretik pembentukan human capital dilakukan melalui investasi pendidikan dan pelatihan. Indikator manusia sebagai modal dimaksud adalah menjadi manusia produktif, memiliki skill, kompeten, kreatif dan menghasilkan nilai tambah. Dalam konteks inklusi keuangan membangun modal manusia pelaku UKM sektor ini dengan memberikan akses permodalan melalui pembiayaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai edukasi dan terjadi proses konsultatif dan komunikatif menuju peningkatan usaha yang lebih produktif.

Kemajuan dan penguasaan teknologi merupakan faktor yang cukup dominan mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia bersamaan dengan faktor pendidikan. Namun pendidikan yang tinggi dan penguasaan teknologi yang canggih belum tentu mampu mengoptimalkan produktivitas sumberdaya manusia jika tidak didukung dengan modal keuangan. Karena itu keterbukaan akses keuangan untuk meningkatkan modal usaha menumbuhkan rasa tanggung jawab dan berpikir kreatif untuk lebih produktif dalam mengelola modal kerja dari perbankan tersebut agar kegiatan usaha dapat berkembang dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Di sini ada unsur pendidikan yang bersifat informal, yaitu menstimulasi berpikir kreatif dengan menumbuh-kembangkan keterampilan dalam mengelola usahanya, sehingga pelaku UKM tidak lagi sebatas sebagai sumberdaya manusia, melainkan terjadi pembentukan modal manusia dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Inklusi keuangan perbankan syariah sebagai sub sistem dari ekonomi Islam, maka bank syariah dalam sistem operasinya harus berorientasi pada *Maqasid syariah* (tujuan-tujuan atau

maksud dari pemberlakuan hukum Islam), yakni harus menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh stakeholder, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan. Artinya tujuan perbankan syariah tidak semata-mata hanya berorientasi pada profitabilitas, akan tetapi mengimplementasikan konsep *maqashid syariah*, yakni (1) mendidik individu, (2) menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan. (Mohammed at.al, 2008). Dengan nilai-nilai pendidikan, keadilan dan kemaslahatan ini pada gilirannya menumbuhkan sikap serta mendorong kemampuan berlaku produktif, terampil dan kreatif dalam menjalankan usahanya.

Dalam pengukuran human capital terdapat tiga pendekatan (Fitz-enz, 2009), yaitu: (1) pengukuran human capital berkaitan dengan kontribusinya pada tujuan perusahaan, (2) berkaitan dengan dampaknya pada proses-proses, (3) berkaitan dengan nilai tambah (*value added*). Tujuan ini mengindikasikan bahwa definisi human capital tidak hanya menekankan pada nilai ekonomi atau produktivitas, edukasi, dan kemampuan/kompetensi. tetapi juga mencakup karakter, sikap, kesehatan, dan motivasi diri. Dengan adanya keterbukaan akses mendapatkan modal kerja dari perbankan dapat mendorong motivasi diri dan perubahan sikap perilaku untuk memenangkan persaingan (*competitive advantage*) usahanya. Di sini ada kontribusi keterbukaan lembaga keuangan terhadap pembentukan modal manusia (human capital).

Modal manusia dapat diciptakan melalui segala proses yang mampu memicu tingkat pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi sehingga melahirkan pengusaha yang kompetitif dan mampu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Faktor kemampuan dan keterampilan modal manusia yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam industri kecil dan menengah (Skuras; 2005). dan sebenarnya, ceramah tentang kebajikan, ketepatan waktu serta kejujuran pun juga termasuk modal (Becker, 1993). Dengan demikian maka adanya hubungan keterbukaan akses keuangan melalui perbankan syariah dengan pembentukan human capital adalah logis. Karena itu inklusi keuangan perbankan syariah memberikan kontribusi bagi pembentukan human capital pelaku usaha sektor riil.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji hubungan inklusi keuangan dengan pembentukan human capital. Analisis membuktikan berkorelasi positif yang signifikan, dan karenanya keterbukaan akses keuangan perbankan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan human capital UKM sektor riil. Keterbukaan dan penyertaan keuangan menguntungkan bagi kelangsungan usaha, sehingga berdampak positif serta meluas terhadap produktivitas UKM sektor riil.

Relasi hubungan antara inklusi keuangan dengan pembentukan modal manusia ditunjukkan dari adanya persamaan kepentingan dalam mendukung kemampuan sumberdaya manusia sebagai faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa, dimana kedua faktor tersebut saling interdependensi. Dalam konteks inklusi keuangan membangun modal manusia UKM sektor riil ini, perbankan syariah memberikan akses permodalan melalui pembiayaan atau menyediakan tabungan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai edukasi serta terjadi proses pendidikan dan pembiasaan untuk peningkatan usahanya agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Keterbukaan akses keuangan untuk meningkatkan modal usaha menumbuhkan rasa tanggung jawab, berpikir kreatif serta produktivitas untuk mengelola modal dari perbankan tersebut, agar kegiatan usaha dapat berkembang dan memperoleh keuntungan yang lebih baik, didasari adanya unsur pendidikan yang bersifat informal, yaitu menstimulasi berpikir kreatif dengan menumbuhkan keterampilan untuk mengelola dan kelangsungan usahanya.

Sebagai bagian dari ekonomi Islam, Bank syariah dalam sistem operasinya harus berorientasi pada *Maqasid syariah* (tujuan-tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam), yang didasari dengan dengan nilai-nilai pendidikan, keadilan dan kemaslahatan, pada gilirannya menumbuhkan sikap serta mendorong kemampuan perilaku produktif, terampil dan kreatif, sehingga memiliki nilai tambah usahanya. Keterbukaan akses mendapatkan modal kerja dari perbankan dapat mendorong motivasi diri serta perubahan sikap dan perilaku cerdas untuk

memenangkan persaingan usahanya. Karena itu inklusi keuangan perbankan syariah memberikan kontribusi bagi pembentukan human capital Usaha kecil menengah sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Atieno R. (2009). Linkages, access to finance and the performance of small-scale enterprises in Kenya. *Journal of Accounting and Business Research*, 3 (1): 33-48.
- Ayushi Raichoudhury. (2016), Financial Inclusion & Human Development: A Cross Country Analysis. KIIT School of Management, KIIT University; *Asian Journal of Business Research* ISSN 2463-4522 Volume 6 Issue 1 2016 DOI 10.14707/ajbr.160020
- Beck, T., A. Demirgüç-Kunt and R. Levine, (2007) "Finance, Inequality and the Poor", *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49.
- Beck, T., R. Levine and A. Levkov (2010), "Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States", *Journal of Finance*, vol. 65(5), pages 1637-1667.
- Becker, G.S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press. (dalam *Uluslararası Sosyal Ara_tirmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009 p.*
- Bollingtoft A, Ulhoi JP, Madsen AH, Neergaard H (2003). Effect of financial factors on the performance of new venture companies in high tech and knowledgeintensive industries: An empirical study in Denmark. *International Journal of Management*, 20 (1): 535-547.
- Brüderl J, Preisdörfer P, Rolf Z (1992). Survival chances of newly founded business organizations. *American Sociological Review*, 57: 227-242.
- Carpenter RE, Petersen BC (2002). Is the growth of small firm constrained by internal equity? *The Review of Economics and Statistics*, 84(2): 298-309.
- Clarke M, Seng D, Whiting RH. (2010). Intellectual Capital and Firm Performance in Australia. From<<http://otago.ourachieve.ac.nz>> (Retrieved May 21, 2009).
- Clarke, G, L.C. Xu and H. Zhou, (2006) "Finance and Income Inequality: What Do the Data Tell Us?", *Southern Economic Journal* vol. 72(3), pages 578-596.
- Collis, D.J. and Montgomery, C.A. (1995). Competing on resources: Strategy in the 1990s. *Harvard Business Review*. July & August, pp.118-28.
- Cooper, Donald R & Pamela S. Schindler. (2001). *Business Reseach Method*. 7th. McGraw Hill International Edition. Boston.
- Denscombe, M. (2004). *The Good Research Guide for small-scale social research*, 2nd edition, Open University Press.
- Emory, WC and Cooper D.R. (1996). *Business Research Method*. 3th edition. Homewood: Richard D. Irwin
- Gallup JL, Sachs JD, and Mellinger AD (1998), "Geography and Economic Development" *NBER Working Paper* No. 6849 Issued in December NBER Program(s): ITI
- Jackson, SL(2011), *Research Methods and Statistics: A Critical Approach*, 4th edition, Cengage Learning.
- Lisa, Chauvet- Jacolin, Luc.(2015) *Financial inclusion and firms performance*, Banque de France, PSL, University Paris-Dauphine, FERDI Banque de France.
- LR. Gay dan P.L. Diehl, (1992). *Reseach Methods for Business*

- Marshal ML, Oliver WN (2005). The Effect of Human Financial and Social on Entrepreneurial Process for Entrepreneurs in India. Masters Thesis, Unpublished. Purdue: Purdue University.
- Mohit Kumar & Kushendra Mishra *The International Journal Of Business & Management* (ISSN 2321 – 8916)
- Pretorius M, Shaw G (2004). Business plan in bank-decision making when financing new ventures in South Africa. *South African Journal of Economics and Management Science*, 7(2): 221-242.
- Roscoe, J. T. (1975). *Fundamental Research Statistics for the Behavioral Sciences*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. p.189-197
- Schultz, T.W. (1993). The economic importance of human capital in modernization. *Education Economics*, 1(1), 13-19.
- Sekaran, Uma. (2000). *Research Methods for Business*. 3th edition. New York. John Wiley & Sons Corp.
- Skuras, Dimitris ,Meccherib, N., Moreirac, M. B., Roselld, J., Stathopouloua,S. (2005). Entrepreneurial human capital accumulation and the growth of rural businesses: A four-country survey in mountainous and lagging areas of the European Union, *Journal of Rural Studies* 21: 67–79.
- Solow, R.(1957). Technical change and the aggregate production function. *Review of Economics and Statistics*, Vol. 39, p. 312-320.
- Stockey.(2003). Human Capital A Self Assessment Checklist For Agency Leader-office Of The Controller General. *The Concise Encyclopedia of Economics*, 2002, Human Capital by Becker, Library of Economics and Liberty <http://www.econlib.org/> [8 Ogos 2006]
- Thomas Dunn & Douglas Holtz-Eakin, (2000). *Journal of Labor Economics*, vol. 18, no.2, (April, pp. 287-305)
- Wiklund J, Shepherd D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. *Journal of Business Venturing*, 20: 71-91.
- Zhou H, Chen, X.(2008). *Resource capabilities and new venture choice*. From <http://74.125.77.132/search?q=cache:mgr4d29qtqpQ5:www.ceauk.org.uk/20> (Retrieved May 25, 2008).